

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Deskripsi kasus *hoax* yang pernah ditangani oleh Polda Jatim

###### a. Kasus *hoax* dari tahun 2016 yang ditangani oleh Polda Jatim

Penulis akan menjelaskan mengenai kasus *hoax* yang ditangani oleh Polda Jatim pada tahun 2016. Data yang diperoleh penulis dari Polda Jatim pada tahun 2016, terdapat 2 (dua) kasus penyebaran berita bohong. . Kedua kasus ini masih dalam proses penyidikan (belum p21) di Polda Jatim. Penulis akan sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 1** : Data kasus *hoax* di Polda Jatim tahun 2016

No	Tahun	Kasus	Pelaku
1	2016	Hoax di media sosial facebook	IF
2	2016	Hoax melalui media telepon	RFF

*Sumber: data diolah dari hasil wawancara dengan Penyidik Unit Cyber*

*Crime Iptu Fajar Bangkit Sutomo S.Kom*

*Hoax* dapat disebarkan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Dimana pelaku biasanya menyebarkan melalui berbagai media sosial (*facebook, instagram, BBM* dll).

###### b. Data pelaku pelaku penyebar *hoax*

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari 2(dua) kasus yang terjadi di Polda Jatim. Kasus ke-I yaitu Irawan Fadli dan kasus ke-II Raden Djaelani. Kedua kasus tersebut masih dalam proses penyidikan belum (p-21)

yang terjadi pada tahun 2016. Selanjutnya akan penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 2:** Data Pelaku Penyebaran Berita Bohong di Polda Jatim tahun 2016 :

No	Nama Pelaku Penyebaran Berita Bohong	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan	Tempat Tinggal
1.	Irawan Fadli	L	30	Wiraswasta	Jalan. Blauran 3 No. 17, Surabaya
2	Raden Djaelani	L	40	Wiraswasta	Jalan. Dukuh Menanggal No. 30, Surabaya

*Sumber : data diolah dari berkas dan hasil wawancara dengan Penyidik*

*Unit Cyber Crime Iptu Fajar Bangkit Sutomo S.Kom yang menangani kasus penyebaran berita bohong di Polda Jatim*

Data di atas menunjukkan bahwa pelaku penyebaran berita bohong di wilayah surabaya pada tahun 2016 dilakukan oleh seorang laki-laki, pekerjaannya adalah wiraswasta, dan para pelaku penyebaran berita bohong tersebut semuanya tinggal di Surabaya.

Setelah penulis menguraikan mengenai data pelaku penyebaran berita hoax. Penulis akan menjelaskan tentang posisi kasus yang ditangani oleh Polda Jatim :

**- Posisi Kasus**

**Kasus I :**

Awal mula kasus pada tanggal 9 September 2016. Kasus bermula ketika salah satu pengguna media sosial facebook bernama Irawan Fadli menuliskan status yang bermuatan berita bohong. Status tersebut berbunyi sebagai berikut : “Pengangkatan kepala BIN (Badan Inteljen Negara) karena pesanan seseorang”

Selain status tersebut, Irawan Fadli juga menuliskan status sebagai berikut :

“Hai rakyat pribumi keturunan Indonesia, apakah kalian rela Indonesia bernasib seperti Singapura dalam bidang ekonomi dan perdagangan. China sudah menguasai Indonesia. Selamatkan negara NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) agar tidak bernasib seperti Singapura yang presidennya dari China”

Karena Irawan Fadli menuliskan status seperti yang dijelaskan diatas. Maka masyarakat menjadi terganggu dengan status yang ditulis oleh Irawan Fadli. Kemudian ada salah satu warga yaitu Muhammad Yadi yang melaporkan status yang diunggah oleh Irawan Fadli tersebut ke Polda Jatim.

Dari kasus ini dapat dilihat bahwa penggunaan media sosial yang digunakan adalah media sosial *facebook*, bisa menjadi tempat atau media untuk menyebarkan *hoax*. Dalam kasus diatas bisa berbahaya akibatnya apabila ada pihak yang percaya dengan apa yang dituliskan oleh Irawan Fadli tersebut dan ikut menyebarkannya. Penyebaran di media sosial sangatlah mudah, hanya dengan *copy paste* status tersebut dan mengunggahnya di akun pribadinya dapat membuat lebih banyak orang yang terkecoh dengan status tersebut.

#### **Kasus II :**

Pada tanggal 14 November 2016 Gereja Paroki Gembala Baik menerima telepon yang berupa berita bohong dari orang yang tidak dikenal. Dalam percakapan telepon tersebut, Raden Djaelani mengatakan bahwa ada bom yang akan segera meledak di Gereja Paroki Gembala Baik. Sambil mengucap “Di gereja ini ada bom, dan akan segera meledak. Allahuakbar-Allahuakbar” Lalu pelaku menutup teleponnya.

Dalam kasus ini. Pelaku Raden Djaelani menggunakan media telepon. Jadi media telepon juga bisa menjadi media penyebaran berita bohong.

Dari kedua kasus diatas, pada kasus pertama melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pada kasus kedua melanggar pasal 28 ayat 2 dan atau pasal 29 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni sebagai berikut :

Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal 29 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Keduanya telah menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dan menimbulkan kerugian pada masyarakat. Pada kasus kedua yang merupakan *hoax* teror bom. Membuat masyarakat resah hingga mendatangkan tim gegana untuk menyisir area Gereja Paroki Gembala Baik.

## **B. Katagori *hoax* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia**

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *hoax* di Indonesia, yang pertama *hoax* diatur dalam pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, , dan pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya akan penulis uraikan lebih rinci:

### **a. Pasal 390 KUHP**

Pasal 390 KUHP berbunyi :

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang

dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Unsur dari pasal 390 KUHP adalah sebagai berikut :

- Barang siapa

Barang siapa merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka ia terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

- Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain  
Didalamnya terkandung unsur kesengajaan. Dengan maksud dibuktikan tentang maksud pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku sengaja untuk melakukan hal tersebut untuk menguntungkan dirinya atau orang lain. Pelaku sadar bahwa perbuatannya adalah perbuatan melawan hukum.
- Menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga

Menaikkan atau menurunkan harga barang-barang tersebut dengan menyiarkan kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.<sup>45</sup>

- Menyiarkan kabar bohong

Kabar yang disiarkan tersebut adalah kabar bohong. Yang dipandang kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.<sup>46</sup>

Pasal 390 KUHP menjelaskan mengenai berita/kabar bohong hanya sebatas dalam hal perdagangan saja.

- b. Pasal 28 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Unsur dari pasal 28 ayat 1 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Setiap orang

---

<sup>45</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor; Polotia. Hal 269.

<sup>46</sup> *Ibid.*

Setiap orang merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari pada suatu tindak pidana.

- Dengan sengaja dan tanpa hak

Harus ditelaah terlebih dahulu apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu. Dan juga apakah perbuatan itu memang dilakukan tanpa hak.

- Menyebarkan berita Bohong dan menyesatkan

Kabar yang disiarkan tersebut adalah kabar bohong. Yang dipandang kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.<sup>47</sup>

Menyebarkan berita bohong yang diatur adalah perbuatannya sedangkan kata menyesatkan yang diatur adalah akibatnya

- Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pembedaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik ini mengatur mengenai hoax secara luas. Dan untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal

---

<sup>47</sup> Ibid.



28 ayat (1) UU ITE maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi.

Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)

Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan mengenai ujaran kebencian (*hate speech*). Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 dijelaskan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya diluar KUHP, yang berbentuk antara lain :

1. penghinaan
2. pencemaran nama baik
3. penistaan
4. perbuatan tidak menyenangkan
5. memprovokasi
6. menghasut
7. penyebaran berita bohong

Dan semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Kasus *hoax* yang menimbulkan kerugian fatal terjadi di Jawa Barat. Penulis membaca berita ini di portal media *Line Today* setelah wawancara dengan Bapak Fajar dari Unit Cyber Crime Polda Jatim. Awal mula berita *hoax* tersebut adalah Selebaran berlogo Polda Jabar soal waspada penculikan anak. Selebaran berlogo Polda Jabar itu berupa teks yang isinya :

PERHATIAN!!!

Waspada ada penculik anak-anak yang berumur 1-12 tahun. Bapak-bapak Ibu-ibu harus menjaga anak kira dengan hati-hati.

Penculik sedang ada dalam kampung-kampung dan dia menyamar sebagai : Penjual, Om Telolet, Orang Gila, Ibu Hamil, Pengemis, dll, Tolong disebarkan. Terimakasih.

Kabar *hoax* penculikan berembus di wilayah Pantura Brebes, Tegal, pemalang, hingga Batang. Penyebarannya melalui media sosial *facebook*. Yang dituduh adalah orang-orang gila dikampung.

Karena berita *hoax* tersebut seorang pria yang berpakaian lusuh menjadi korban berita *hoax* ini. Ketika Toyo (gelandangan) tersebut sedang berjalan diarea persawahan di Dukuh Jantilan di Brebes. Lalu ada beberapa warga yang meneriaki dia penculik. Lalu warga mengejar dan menangkap pria tersebut. Tak hanya itu, sejumlah warga yang sudah terpancing emosinya memukulinya secara brutal. Warga juga mengarah pria tersebut keliling kampung. Kakinya diikat dan digantung disepotong bambu dan kepala berada dibawah, lalu digotong seperti binatang hasil buruan.

Karena perbuatan warga yang mengamuk tersebut, korban dalam keadaan babak belur. Dan berdasarkan pemeriksaan dokter di RSUD Brebes, korban mengalami luka-luka di bagian kepala dengan diagnosis mengalami gegar otak ringan, lalu ada luka dibagian badan dan kaki akibat kekerasan benda tumpul.<sup>49</sup>

Dalam kasus diatas, warga percaya dengan *hoax* yang disebarkan dalam media sosial facebook. Dan langsung tersulut emosinya tanpa melihat kebenaran dari selebaran tersebut. Hanya karena selebaran tersebut berlogo Polda Jabar maka masyarakat langsung percaya dan langsung menganiaya warga yang diduga merupakan penculik anak tersebut.

Selain Bapak Toyo, yang menjadi korban. Ada juga seorang ibu di Batang, Jawa Tengah menjadi korban dari berita *hoax* penculikan anak ini. Ibu tersebut mengalami gangguan kejiwaan dan dikeroyok oleh warga, dipukuli, ditendang dan ditelanjangi.

Berita *hoax* sangatlah berbahaya. Dalam berita *hoax* senyatanya pasti membuat suatu pihak merasa dirugikan. Tetapi kembali lagi kepada diri masing-masing untuk dalam menyaring informasi-informasi yang diterima, bukan langsung disebarkan tanpa jelas berita itu benar adanya dan tidak jelas sumbernya.

Sedikitnya berita *hoax* yang diproses hukum menurut penulis disebabkan oleh masyarakat yang menganggap kerugian yang diderita oleh

---

<sup>49</sup> Line Today, *Pengakuan Gelandangan yang Nyaris Tewas Gara-Gara Hoax*. Diakses 8 Maret 2017.

masyarakat lain tidak begitu penting. Pada awalnya penulis juga menganggap *hoax* tidak terlalu berbahaya, tidak akan memakan korban, hanya mungkin sebagian masyarakat terhasut dan percaya.

Tetapi pada kenyataannya *hoax* sangatlah berbahaya, satu berita *hoax* bisa menimbulkan banyak kerugian. Dan polisi harus lebih aktif lagi dalam menanggapi beredarnya berita *hoax*.

### **C. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tersebarnya berita *hoax***

#### **a. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tersebarnya berita *hoax***

Aparat penegak hukum Polda Jatim merupakan bagian dari aparat penegak hukum yang mempunyai peran dalam mengurangi lahirnya pelaku pembuat berita bohong (*hoax*). Upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jatim tidak terlepas dari teori yang sudah penulis paparkan dalam Bab II.

Upaya-upaya tersebut ialah upaya preventif, yaitu upaya untuk mencegah (menangkal, menanggulangi) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Dan yang kedua adalah upaya represif yaitu upaya yang dilakukan setelah kejahatan terjadi.

Pertama-tama penulis akan menguraikan upaya kepolisian dalam bentuk preventif, lalu penulis akan menjelaskan juga upaya kepolisian dalam bentuk represif.

##### **1. Upaya preventif**

Dalam wawancara penulis dengan penyidik Unit *Cyber Crime* Polda Jatim, untuk upaya preventif. Polda Jatim rutin melakukan seminar dan pelatihan yang berkaitan dengan *cyber crime*. *Hoax* termasuk dalam *cyber crime*, dan dengan sasaran kegiatan ditujukan kepada mahasiswa, pekerja dan instansi pemerintah.

Polda Jatim telah 6 (enam) kali mengadakan seminar tentang tindakan preventif tindak pidana *cyber crime*. Dalam seminar ini Polda Jatim menjelaskan mengenai *cyber crime* secara keseluruhan, beserta tindak pidana apa saja yang termasuk dalam *cyber crime*. Serta menekankan bahaya *cyber crime* kepada masyarakat.

Tujuan diadakannya seminar ini adalah agar masyarakat bisa lebih mengerti *cyber crime*, agar masyarakat tidak menganggap *cyber crime* merupakan hal biasa, untuk menambah wawasan masyarakat luas terhadap kejahatan dan modus operandinya yang semakin modern, dan agar masyarakat lebih teliti dalam menyaring informasi apapun yang diterima agar tidak mudah percaya terhadap apapun yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Seminar dan pelatihan ini dilaksanakan oleh Polda Jatim pada tahun 2015, dan tahun 2016..<sup>50</sup>

## 2. Upaya Represif

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Iptu Fajar Bangkit Sutomo S.Kom, Penyidik Unit Cyber Crime Polda Jatim. 6 Maret 2017.

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Dalam sub bab ini, penulis akan menguraikan mengenai upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi *hoax*.

**Tabel 3** : Bentuk Upaya Represif oleh Polda Jatim dalam menangani *hoax*

Kasus	Upaya Represif
<p>Kasus I</p> <p>Pelaku Irawan Fadli, menulis status di facebook yang bermuatan berita bohong.</p> <p>“Pengangkatan kepala BIN (Badan Inteljen Negara) karena pesanan seseorang”</p> <p>dan</p> <p>“Hai rakyat pribumi keturunan Indonesia, apakah kalian rela Indonesia bernasib seperti Singapura dalam bidang ekonomi dan perdagangan. China sudah menguasai Indonesia. Selamatkan negara NKRI agar tidak</p>	<p>Pelaku dikenakan pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>Yang berbunyi “<i>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).</i>”</p>

bernasib seperti Singapura yang presidennya dari China”	
<p>Kasus II</p> <p>Pelaku Raden Djaelani, menelepon Gereja Paroki Gembala Baik, dalam percakapan teleponnya pelaku mengatakan bahwa ada bom yang akan segera meledak di Gereja Paroki Gembala Baik.</p>	<p>Pelaku dikenakan pasal 28 ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi : <i>“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).</i></p> <p>dan atau pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :</p> <p><i>“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang</i></p>

	<i>ditujukan secara pribadi”</i>
--	----------------------------------

*Sumber : data diolah dari berkas dan hasil wawancara dengan Penyidik  
Unit Cyber Crime Iptu Fajar Bangkit Sutomo S.Kom yang menangani  
kasus penyebaran berita bohong di Polda Jatim*

Dari tabel tersebut tersebut dapat terlihat berbagai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jatim dalam menangani kasus-kasus *hoax*. Berikut penulis akan menguraikan lebih jelas dan terperinci :

Pada kedua kasus diatas, polisi melakukan upaya penegakan hukum represif atau upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, yang dilakukan oleh kepolisian adalah melakukan penangkapan atau penahanan kepada para pelaku yang kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan.

Selanjutnya penyelesaian dapat dilakukan melalui hukum yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti yang penulis jelaskan diatas.<sup>51</sup>

#### **b. Kendala Kepolisian dalam menangani *hoax***

Dalam menanggulangi kejahatan, tentunya akan ada kendala dalam prosesnya. Berikut akan penulis uraikan mengenai kendala-kendala dari kepolisian dalam menanggulangi *hoax*, kendala-kendalanya yang dihadapi kepolisian adalah sebagai berikut :

---

<sup>51</sup> *Ibid.*



1. Tidak adanya kerja sama dengan media sosial (*facebook, instagram, twitter* dsb)

Hingga saat ini, belum ada kerjasama antara media sosial dengan pihak kepolisian untuk data pengguna sehingga sulit bagi pihak kepolisian untuk melakukan pelacakan terhadap akun-akun yang ada di internet.

Hal tersebut dikarenakan tidak semua pengguna media sosial melengkapi data profilnya. Banyak data yang terkadang di sembunyikan hanya untuk diri sendiri yang bisa melihat. Karena jika profil kita dapat dilihat oleh semua orang.

Maka pihak kepolisian sendiri melakukan penyelidikan untuk memperoleh data pengguna, dan sulit untuk mendapatkan data-data pengguna tersebut.

2. *Anonymous Identity*

Banyak pelaku-pelaku kejahatan cyber menggunakan akun “tanpa nama” yaitu *anonymous identity*. Karena tidak diketahui nama dari pemilik akun tersebut. Biasanya akun-akun palsu seperti ini memang sengaja dibuat untuk berbuat kejahatan. Maka akun-akun tersebut tidak memiliki data pengguna sama sekali yang dapat menjadi acuan polisi untuk melakukan penyelidikan. Jika *anonymous identity* polisi lebih kesulitan dalam melacak pemilik akun-akun tersebut<sup>52</sup>.

Kendala-kendala yang telah dijelaskan diatas merupakan kendala kepolisian saat menyelesaikan kasus-kasus. Terutama kasus *cyber crime*.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

Karena dalam media internet cakupannya sangatlah luas. Banyak akun palsu yang ada dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Seperti pengancaman. Banyak diinstagram orang membuat akun palsu untuk menyerang pengguna lain.

